

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 12, Nomor 1, Oktober 2017

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sekretaris Penyunting/Managing Editor:

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana/Editors:

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

Sekretariat/Secretary:

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571

Email:

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terintegrasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

**PEREMPUAN DAN DERADIKALISASI: Peran Para Istri Mantan
Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi**

Umi Najikhah Fikriyati 1-16

***IMPLICATION OF CONFLICT OF OWNERSHIP REGIONAL
ASSETS IN THE EXPANSION OF BAU-BAU CITY
IN THE TERRITORY OF EX BUTON SULTANATE***

Darmin Tuwu 17-36

***SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberative
Democracy in Bojonegoro Regency***

Galang Geraldly 37-54

**POLITIK IDENTITAS ANIMAL POP DANCE: Subbudaya dan
Gaya Hidup Hibrid**

Imam Setyobudi 55-70

**STRATEGI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN DESA WISATA
DI SENDANGSARI, PAJANGAN, BANTUL, DIY**

Nur Endah Januarti dan V. Indah Sri Pinasti 71-86

**KONTROL SOSIAL DALAM PEMBINAAN KARAKTER
RELIGIUS PESERTA DIDIK MUSLIM DI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL**

Khamalida Fitriyaningsih dan Syamsul Bakhri 87-96

**MEKANISME PENGELOLAAN KARET RAKYAT DI TABIR ILIR
JAMBI DALAM PERSPEKTIF TEORI PILIHAN RASIONAL**

Pahrudin HM 97-118

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Sufyati HS 119-136

ESTETIKA FASHION URBAN

Tri Aru Wiratno 137-150

**MERAWAT KALI-MERANCANG ASA KOTA: Kontestasi dan
Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta**

Siti Zunariyah dan Akhmad Ramdhon 151-170

RESENSI BUKU: Anak Mendambakan Orang Tua yang Utuh

Napsiah 171-178

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 1 ini mengkaji banyak persoalan dalam masyarakat, mulai dari permasalahan perkotaan sampai dengan permasalahan terorisme sebagai permasalahan rumit yang dihadapi oleh semua negara saat ini.

Tulisan Umi Najikhah Fikriyati yang berjudul “Perempuan dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi” menjelaskan hingga tahun 2016 jumlah pelaku tindakan terorisme berjumlah 1070 orang, dari jumlah tersebut sebagian telah menyelesaikan masa hukumannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan

fenomenologi menunjukkan bahwa dalam dua keluarga mantan terpidana terorisme, istri memiliki peran dalam menderadikalisasi para suami untuk tidak lagi terlibat dalam aksi terorisme. Proses deradikalisasi telah dimulai ketika suami menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan cara melakukan kunjungan rutin ke lembaga pemasyarakatan. Selain itu istri juga berusaha untuk tidak bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini secara tidak langsung dapat menjauhkan suami dari kelompok yang diikutinya.

Darmin Tuwu menulis tentang permasalahan konflik kepemilikan aset di daerah, dengan tulisannya yang berjudul “Implikasi Konflik Kepemilikan Aset Daerah dalam Pemekaran Kota Bau-Bau di Wilayah Eks Kesultanan Buton”. Menurut penulis konflik yang terjadi antara dua pemerintahan daerah ini, berawal ketika Kotif Bau-Bau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Bau Bau, di mana hampir seluruh aset daerah Kabupaten Buton (kabupaten induk) berada dalam wilayah Kota Bau-Bau selaku Daerah Otonomi Baru. Tidak ada solusi konklusif untuk konflik yang dimulai pada tahun 2001, dampak dari konflik tersebut terlihat pada layanan publik, Pendapatan Asli Daerah, dan pemisahan sosial.

Galang Geraldly menulis tentang *Dialog Sobo Pendopo: Manifestasi Demokrasi Deliberasi di Kabupaten Bojonegoro*. Penulis menjelaskan latar belakang persoalan sosial ekonomi yang kompleks menjadi pemantik revolusi politik keterbukaan dan deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Dialog Sobo Pendopo, yang digagas sejak keterpilihan Kang Yoto-Kang Hartono dalam pilkada tahun 2008 ini, menjadi pintu dalam mendiseminasi praktik revolusi politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui *Open Government Partnership* 2016.

Imam Setyobudi menulis tentang Politik Identitas *Animal Pop Dance: Subbudaya dan Gaya Hidup Hibrid*. Menurutnya politik identitas dapat mengkonstruksi sebuah subbudaya dengan gaya hidup tertentu melalui penciptaan koreografi *Animal Pop Dance*. Suatu *hip hop* Indonesia yang merupakan proses hibridisasi hibrid dari *hip hop* yang tumbuh di Amerika Serikat oleh kalangan *Africa-America* dicampuradukan dengan tiga tari tradisi lokal Indonesia (Jawa, Sunda, Papua) bertema perilaku binatang. *Animal Pop Dance* merupakan tradisi dan budaya hibrid yang berhasrat melepaskan diri dari cengkeraman pola berpikir dikotomi dalam konteks pascakolonial.

Nur Endah Januarti dan V. Indah Sri Pinasti menulis tentang Strategi Pengembangan Lingkungan Desa Wisata di Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY. Nur Endah menjelaskan hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilaksanakan Desa Sendangsari dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan DIY dengan cara: (1) Pemetaan lingkungan berupa potensi desa; (2) Pemberdayaan sosial untuk optimalisasi potensi wisata; (3) Pemanfaatan lingkungan sebagai kawasan pengembangan Desa Wisata; dan (4) Daya dukung pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata.

Khamalida Fitriyaningsih dan Syamsul Bakhri menulis artikel yang berjudul "Kontrol Sosial dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik Muslim di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal". Menurutnya Karakter religius peserta didik SMK N 1 Dukuhturi dibina dengan membiasakan Sholat Dhuha. Sebagai kontrol sosial, guru menerapkan hukuman berupa penempelan pin bertuliskan "jangan tiru aku" bagi yang tidak rajin melaksanakan dan pemberian penghargaan berupa mukenah bagi yang rajin melaksanakan. Pembinaan karakter religius yang dilakukan adalah sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam, disiplin, toleran dan jujur melalui pembelajaran akidah. Pembiasaan

Sholat Dhuha baru dilaksanakan dengan maksimal oleh beberapa wali kelas; butuh dukungan dari seluruh warga sekolah agar bisa menjadi sebuah pembinaan karakter religius yang kuat. Dampaknya masih banyak peserta didik di kelas lain yang belum memiliki rasa kebutuhan spiritual.

Pahrudin menulis tentang Mekanisme Pengelolaan Karet Rakyat di Tabir Ilir Jambi, dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional. Penulis menjelaskan karet merupakan tanaman yang dibudidayakan dan menjadi tumpuan kehidupan banyak orang sejak lama, tak terkecuali petani di Tabir Ilir yang menjadi salah satu sentra karet di Provinsi Jambi dengan 15.787 hektare dan 8.050 keluarga. Untuk mendapatkan hasilnya, petani karet di Tabir Ilir menerapkan mekanisme pengelolaan karet secara mandiri dan menyerahkannya kepada pihak lain. Penerapan kedua mekanisme ini dilakukan oleh petani karet berdasarkan perspektif pilihan rasional mereka. Petani karet dengan sumber daya yang cukup akan memilih cara mengelola secara mandiri, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang memadai, akan memilih menyerahkan pengelolaan karetnya kepada orang lain. Mekanisme pengelolaan yang dipilih oleh petani karet ini berdampak pada ketimpangan pendapatan yang mereka peroleh. Di satu sisi, ada orang yang menghasilkan lebih dari pengelolaan karet yang mereka lakukan, sementara di sisi lain ada mendapat hasil yang kurang.

Sufyati menulis tentang *Corporate Social Responsibility: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Sufyati menegaskan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, antara ekonomi, sosial dan lingkungan, kekuatan faktor itu akan membentuk kemandirian masyarakat, di samping faktor lainnya. Secara normatif penyelenggaraan program CSR, didorong oleh kesadaran untuk bertanggung jawab secara sosial, tetapi umumnya kepentingan untuk membentuk *corporate image* melalui bantuan terasa lebih menonjol, sehingga belum memikirkan aspek keberlanjutan pembangunan.

Tri Aru Wiratno menulis tentang "Estetika Fashion Urban". Menurutnya keindahan sebuah realitas yang ada dalam sejarah kehidupan manusia, di mana menjadi keindahan sebuah kehidupan sehari-hari dari masyarakat urban. Bagi masyarakat urban, keindahan bukan sebuah nilai tapi sebagai sebuah tanda dan yang menandai sehingga keindahan bukan menjadi sebuah makna dan tujuan dari sebuah karya seni tapi sebuah gaya hidup (*lifestyle*) urban. Estetika

fashion Urban dengan pendekatan fenomena yang berkembang pada kehidupan masyarakat kota, saat ini. Bahwa estetika fashion menjadi bagian dari masyarakat urban. Sebagai gambaran dari masyarakat urban yang memberikan bentuk dari estetika fashion.

Siti Zunariyah dan Akhmad Ramdhon menulis tentang Merawat Kali-Merancang Asa Kota: Kontestasi dan Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta. Penulis menjelaskan kota-kota kini berubah oleh skema pembangunan yang dipaksakan oleh beragam kepentingan ekonomi, politik maupun budaya dalam relasi pusat dan daerah. Dalam satu dekade terakhir, kondisi atas dominasi pembangunan yang berorientasi pada aspek fisik tidak juga berubah. Dalam beberapa aspek skalanya makin besar dan makin massif oleh kepentingan desentralisasi. Kewenangan yang terdelegasi dalam kerangka kebijakan memberi pondasi bagi pemerintah daerah mengakselerasi perubahan lewat berbagai skema otonomi. Di mana orientasi yang paling dominan dari semua upaya tersebut adalah kota yang bertransformasi dengan nalar ekonomi-politik. Artikel ini menarasikan bagaimana skala pembangunan kota mengubah ruang-ruang spasial kota dan berimbas pada ekologi kota yaitu sungai. Narasi atas perubahan sungai dalam satu dekade terakhir bertransformasi oleh banyak penyebab dan bisa dilihat dari dimensi perubahan fisik maupun nonfisik. Orientasi pembangunan yang ada memarjinalkan sungai dan pada saat bersamaan sungai menanggung beban pembangunan. Titik krusial dari gagasan partisipasi juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kota, sungai dan warga yang tinggal dalam kesehariannya di kampung-kota. Situasi Surakarta memberi konstruksi kompleksitas relasi kepentingan komunitas serta pemaknaan ulang atas sungai sebagai bagian dari kota. Dinamika kampung-kota di kawasan sungai mampu merepresentasikan kontestasi nilai, kepentingan maupun relasi-relasi sosial dalam konteks kota.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 1. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab

Wassalamualaikum wr.wb

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



STRATEGI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN DESA WISATA DI SENDANGSARI, PAJANGAN, BANTUL, DIY

Nur Endah Januarti dan V. Indah Sri Pinasti

Universitas Negeri Yogyakarta

Alamat Email: endahjanuarti@uny.ac.id

Abstract

The article describes the strategy of village based tourism development. Departed from Law on Village and Law on "Keistimewaan DIY", this research underlines potential development of Sedangsari as a new tourism destination in. The data obtained through research conducted by qualitative descriptive methods such as observation, interview and documentation. The informants involved in the research process are the Village Head, the village were management board ie (LPMD), PKK, Karang Taruna and the Tourism related agency, the Head of the Sadar Wisata Group. It also involves the Office of Culture and Tourism of Bantul Regency. The research highlights the agency of local actors which underline four strategic steps, which are 1) Community mapping for village potency; 2) Social empowerment to optimize tourism potential; 3) Transforms as Tourism the Village as development area; 4) Initiative to influence local government to support the village of the government in the management of the Tourism Village.

Keywords: Environment, Tourism Village, Sendangsari and Strategy.

Intisari

Artikel ini menjelaskan tentang strategi pengembangan lingkungan sebagai kawasan desa wisata yang dilakukan di Sendangsari. Penelitian dilatarbelakangi munculnya UU Desa dan UU Keistimewaan DIY sehingga mendasari berbagai

kawasan perdesaan dalam mengembangkan lingkungan. Di Desa Sendangsari strategi pengelolaan lingkungan dilakukan sebagai bentuk pengembangan pariwisata. Data-data diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam proses penelitian adalah Kepala Desa, pengurus lembaga desa yakni LPMD, PKK, Karang Taruna dan Pelaku Pariwisata yakni Ketua Kelompok Sadar Wisata. Selain itu juga melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai stakeholder pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilaksanakan Desa Sendangsari dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan DIY adalah 1) Pemetaan lingkungan berupa potensi desa; 2) Pemberdayaan sosial untuk optimalisasi potensi wisata; 3) Pemanfaatan lingkungan sebagai kawasan pengembangan Desa Wisata; 4) Daya dukung pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata.

Kata Kunci: Lingkungan, Desa Wisata, Sendangsari dan Strategi

Pendahuluan

Babak baru pembangunan desa dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. UU yang menjamin otonomi desa ini berawal dari kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk dapat memberikan kewenangan dalam proses pembangunan desa. Desa sebagai aspek mandiri proses pembangunan dan keberlangsungan hidup masyarakat di dalamnya yang menitikberatkan aspek potensi dan kondisi lingkungan setempat. Disebutkan oleh Ari Sujito¹, Pemerintah dan DPR secara formal memiliki komitmen untuk melakukan pembaruan desa melalui regulasi ini. Poin penting yang terdapat dalam UU Desa adalah adanya sebuah proses transformasi desa dalam beberapa hal diantaranya pembaharuan agraria, demokratisasi desa, pemenuhan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, keadilan gender, lingkungan yang manusiawi dan berkelanjutan. Poin menarik dalam kebijakan ini adalah adanya beberapa pengakuan atas dasar desa yang cukup strategis dalam pengelolaan desa.

Pada pasal 4 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan

1 Ari Sujito, *Transformasi Desa: Apa yang bisa Dimanfaatkan dari UU Desa?*. Materi Diskusi Implementasi UU Desa Karang Taruna DIY, (Yogyakarta: 2014)

memberikan pengakuan dan kehormatan atas desa berdasar keragaman, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi desa, membentuk pemerintahan desa yang profesional, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan perekonomian dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Posisi sentral masyarakat desa jelas disebutkan sebagai subjek pembangunan dan memiliki kewenangan dalam memaksimalkan potensi desa dan melestarikan adat budaya. Keberadaan desa menjadi cukup strategis dalam pembangunan.

Salah satu hal yang digarisbawahi dalam hal ini adalah adanya keberlangsungan lingkungan yang manusiawi dan berkelanjutan. Lingkungan sebagai pusat aktivitas masyarakat di perdesaan menjadi ruang gerak yang mempengaruhi kehidupan manusia di dalamnya. Keberlangsungan hidup masyarakat perdesaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Desa sebagai sebuah kesatuan hidup masyarakat ditentukan oleh kondisi lingkungan yang ada di sekitar individu. Lingkungan akan menentukan pola dan aktivitas manusia di dalamnya. Maka gejala awal pembentukan desa dipengaruhi oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui berbagai hal yang ada di sekitar/lingkungan. Kesatuan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya sehingga terdapat beberapa desa seperti desa pertanian, desa perikanan, desa perkebunan, desa peternakan, desa perdagangan dan desa perindustrian.. Berbagai bentuk kondisi dan karakteristik lingkungan dengan segala potensinya dapat mempengaruhi kesatuan hidup masyarakat berupa bentuk perilaku dan aktivitas manusia di dalamnya. Maka sejalan dengan UU Desa, masyarakat desa memiliki kewenangan untuk dapat mengelola lingkungan dengan segala potensinya sebagai bagian dari proses pembangunan desa.

Wewenang dan otonomi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan potensi di daerah selain termuat dalam UU Desa juga termuat dalam kebijakan lain yakni Undang-Undang Keistimewaan DIY No 13 tahun 2012. DIY merupakan kawasan yang terdiri atas 4 kabupaten yakni Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Gunung Kidul dan 1 kotamadya. Kabupaten-kabupaten tersebut masih berada dalam wilayah perdesaan dan secara administratif terdiri atas pemerintahan desa di setiap wilayah. Sedangkan Kota Yogyakarta memiliki sistem administratif per kecamatan. Penetapan UU No 13 tahun 2012

tentang Keistimewaan DIY menjadi babak baru dalam perjalanan DIY. Melalui UU tersebut pemerintah RI memberikan pengakuan terhadap keberadaan DIY dengan 5 kewenangan yakni (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur/ wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, (e) tata ruang. Selanjutnya dinyatakan dalam peraturan ini bahwa pelaksanaan kewenangan Keistimewaan ini didasarkan pada kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY kewenangan kebudayaan. Pada pasal 31 disebutkan bahwa kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Terkait dengan kewenangan kebudayaan untuk dapat melestarikan kearifan lokal maka dilaksanakan salah satunya melalui pengembangan potensi pariwisata di masyarakat. Mengingat pariwisata juga sebagai satu wujud aktivitas menyeluruh yang mengandung kebudayaan setempat. Pitana² menjelaskan pariwisata sebagai sebuah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Dalam hal ini pariwisata menitikberatkan pada potensi masyarakat terutama kebudayaan. Adanya pembangunan pariwisata memiliki peran cukup signifikan dalam beberapa aspek yakni aspek ekonomi, sosial dan lingkungan³.Terkait aspek ekonomi, pariwisata dapat memberikan pemasukan devisa bagi sebuah negara dan pendapatan daerah melalui wisatawan. Secara sosial pariwisata mampu menyerap tenaga kerja, memberikan apresiasi seni, tradisi, kebudayaan dan jati diri bangsa yang diwujudkan oleh masyarakat. Bagi aspek lingkungan, pariwisata mampu mengangkat produk dan jasa wisata.

Sendangsari merupakan sebuah kawasan perdesaan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan ini memiliki karakteristik masyarakat dan lingkungan yang cukup beragam. Disebutkan oleh Pinasti⁴ bahwa dari berbagai media ditemukan bahwa di desa ini terdapat sumber pariwisata dikelola sebagai sebuah kawasan Desa Wisata. Desa Wisata didefinisikan sebagai suatu kawasan perdesaan yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari

2 I Gde Pitana dan Putu Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005)

3 Iwan Nugroho, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

4 V. Indah Sri Pinasti, *Laporan Penelitian: Pembangunan Desa Wisata sebagai Implementasi Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keistimewaan DIY (Studi Di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY)*, (Yogyakarta, 2015), hlm.13

kehidupan sosial, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian dan memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan dan minuman serta kebutuhan wisata lainnya.⁵ Lebih lanjut diungkapkan keberadaan Desa Wisata di Sendangsari berfungsi sebagai sarana edukatif dan rekreatif bagi para wisatawan⁶.

Dari kondisi yang terjadi di Desa Sendangsari, dalam kajian implementasi UU Desa dan UU Keistimewaaan memperlihatkan hubungan implementasi terkait pembangunan pariwisata. Cukup terlihat bahwa ada hal yang menitikberatkan pada kemampuan desa untuk dapat mendayagunakan potensi desa. Terdapat bentuk penyelarasan konsep mewujudkan tujuan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa wisata. Melalui pemetaan potensi desa, pemberdayaan sosial dan peran lembaga desa di Desa Sendangsari. Terlihat implementasi UU Desa di Desa Sendangsari dilaksanakan dengan pengembangan pariwisata. Dalam hal ini Desa menyiapkan secara internal terhadap potensi wisata desa dan potensi masyarakat.

Penempatan atau alokasi kawasan Desa Sendangsari sebagai Desa Wisata tentunya tidak lepas dari permasalahan pengelolaan. Mengingat pengembangan kawasan sebagai desa wisata melibatkan berbagai aspek. Terdapat berbagai isu krusial yang muncul dalam pengelolaan desa wisata yakni desa wisata mudah terkena penetrasi modal luar sehingga memerlukan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan agar dapat terjadi proses kontrol seimbang, desa wisata dapat terjebak oleh stagnasi karena terbatasnya inovasi pengembangan atraksi, desa wisata harus dikelola oleh sumberdaya yang memiliki karakter *entrepreneur* dan sosial, desa wisata cenderung mudah terkena dampak lingkungan perkembangan pariwisata itu sendiri⁷.

Hal penting dan menarik yang kemudian dicermati terkait pilihan pengembangan kawasan sebagai pariwisata berkaitan dengan lingkungan. Ketika melihat kenyataan demikian, kondisi ekologis Desa Sendangsari menjadi faktor yang menarik untuk diperhatikan. Pilihan strategi pengembangan lingkungan sebagai kawasan pariwisata dapat dikaji lebih dalam sebagai bentuk implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan. Prinsip otonomi desa dalam pengelolaan lingkungan dan pilihan terkait strategi pengembangan pariwisata di Sendangsari

5 Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

6 V. Indah Sri Pinasti. *op.cit.* hlm.13

7 <http://www.stpsahidsolo.ac.id>, Diakses pada 3 Maret 2015.

sebagai lingkungan perdesaan menjadi satu hal yang cukup penting untuk ditelaah lebih lanjut. Melalui penelitian ini dilakukan pengkajian tentang implementasi UU Desa dan keistimewaan dalam strategi pengembangan lingkungan sebagai kawasan pariwisata. Hal ini menitikberatkan pada kewenangan desa untuk dapat mengelola wilayahnya salah satunya melalui kegiatan pariwisata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah faktual yang ada pada saat penelitian dilakukan selanjutnya dapat menggambarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana mestinya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat⁸. Maka kajian strategi pengembangan lingkungan di Desa Sendangsari menempatkan kondisi faktual yang berfungsi sebagai data utama. Data secara kualitatif diperoleh melalui prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat dan *stakeholder* desa. Objek penelitian adalah kawasan lingkungan di Desa Sendangsari yang berada di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer berasal dari sumber data yaitu Lurah Desa Sendangsari, Ketua Kelompok Sadar Wisata dan pengurus lembaga desa yang terdiri atas Ketua LPMD, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna. Data sekunder didapatkan dari data yang tersedia dari hasil-hasil literatur dan berbagai sumber referensi terkait dengan pengembangan kawasan di Desa Sendangsari. Selain itu terdapat beberapa data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) yang terdiri atas tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Potensi Lingkungan Desa Sendangsari

Sendangsari adalah kawasan perdesaan yang terdapat di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan perdesaan yang berada di arah barat DIY berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo ini memiliki kurang lebih 1.314.105 hektar wilayah. Di dalamnya secara administratif terdiri atas

⁸ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991) hlm. 63.

18 dusun atau satuan unit wilayah di bawah desa. Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang memiliki struktur kepala dukuh/dusun di bawahnya. Daerah ini memiliki akses jarak yang cukup jauh dari Kota Yogyakarta yakni sekitar 30 kilometer⁹.

Desa memiliki kondisi topografi yang menarik yakni daerah dataran rendah dan daerah bukit/ dataran tinggi. Area dataran rendah dimanfaatkan untuk persawahan, kebun dan ladang, sedangkan kawasan perbukitan dimanfaatkan untuk pengembangan hutan tanaman kayu. Hal ini disebabkan oleh kondisi kawasan yang mana dataran rendah memang banyak didominasi oleh sawah dan perkampungan sedangkan dataran tinggi terdapat hutan tanaman kayu. Maka berdasarkan hal tersebut sampai saat ini pada masing-masing kawasan tersebut mengembangkan potensi alam sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dari data yang diperoleh dalam profil Desa Sendangsari pertanian dengan luas 560 hektar cukup dominan diantara berbagai kawasan lain. Maka kawasan pertanian atau sawah sebagai alternatif pemanfaatan lahan utama di desa ini. Keberadaan potensi lahan yang luas tersebut berdampak pada aktivitas sosial masyarakat. Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dengan mengelola padi, jagung dan palawija. Hal lain yang menarik adalah terdapat pemanfaatan lahan untuk umbi-umbian karena potensi lahan yang memang cocok. Seperti misalnya untuk ketela pohon, ubi jalar dan sebagainya. Selain itu pengembangan kawasan untuk lahan pertanian kacang dan jagung menjadi tanaman yang juga cukup dominan di Sendangsari karena keberadaan lahan yang memang cocok untuk jenis tanaman ini. Lahan pertanian ini tidak hanya berada di kawasan dataran rendah namun juga berada di kawasan dataran tinggi yang masih terdapat beberapa lahan pertanian kosong dan tidak dimanfaatkan untuk tanaman kayu. Pemanfaatan masyarakat untuk hasil pertanian ini cukup bervariasi¹⁰.

Pada daerah yang berada di dataran tinggi sejumlah 273 hektar merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi kayu. Pemanfaatan lahan sebagai hutan kayu jati, sengon, mahoni dan sebagainya memang lebih banyak di kawasan dataran tinggi karena faktor lahan yang luas dan belum terdapat banyak rumah penduduk. Selain itu kondisi tanaman yang tidak terlalu banyak memerlukan air membuat tanaman ini cocok untuk dikembangkan di wilayah dataran tinggi Desa Sendangsari. Hal ini juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.

9 Pemerintah Desa Sendangsari, *Profil Desa Sendangsari*, (Yogyakarta, 2012)

10 Nur Endah Januarti, *Thesis: Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Sumberdaya Lokal*, (Yogyakarta: UGM, 2013)

Pilihan mata pencaharian masyarakat kemudian mengolah lebih lanjut tanaman kayu tersebut sebagai industri kerajinan batik kayu. Januarti (2013) menyebutkan industri ini cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa Sendangsari karena keberadaan kayu yang cukup banyak tumbuh di kawasan dataran tinggi Desa Sendangsari kemudian dapat dimanfaatkan.

Selain kondisi topografi desa yang terdiri atas kawasan dataran rendah dan dataran tinggi sebagai kawasan pertanian dan hutan kayu, Desa Sendangsari memiliki potensi alam yang cukup banyak. Dari pengamatan yang diperoleh didukung profil desa (2012) berbagai potensi alam Desa Sendangsari yakni terdapat Sungai Progo dan Sungai Bedog yang melintasi sekeliling desa, mata air abadi (sendang), terdapat batu kapur di jalur dataran tinggi, perkebunan, dan air terjun. Potensi alam tersebut tentunya juga berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat. Pemanfaatan potensi alam dikembangkan, diolah dan juga dilestarikan sebagai lokasi wisata. Contohnya keberadaan sungai progo dan sungai bedog yang digunakan sebagai spot wisata dan kuliner ikan wader. Selanjutnya perkebunan yang banyak mengandung tanaman lokal dimanfaatkan sebagai kawasan sumber pangan lokal. Air terjun dan mata air dimanfaatkan untuk kawasan wisata air.

Dari berbagai data itulah pilihan pengembangan potensi lahan di Desa Sendangsari disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan sosial masyarakat. Maka terdapat berbagai pilihan pariwisata yang diwujudkan. Menariknya pilihan pariwisata mengolaborasikan antara wisata alam dan buatan. Wisata alam menitikberatkan pada potensi alam Desa Sendangsari baik kawasan lingkungan maupun kondisi lahan, sedangkan wisata buatan berasal dari upaya masyarakat yang diciptakan untuk pengembangan kawasan tersebut seperti misalnya aktivitas mata pencaharian yang menyesuaikan kondisi alam. Berikut berbagai potensi wisata yang dikembangkan sebagai pwujudan dalam pengembangan lingkungan di Desa Sendangsari yakni Desa Wisata Krebet (Batik Kayu), Desa Wisata Mangir (Situs Sejarah Mangir), Air Terjun Pulosari dan Banyunibo, Wisata Kuliner Wader Goreng, Legokan Ngancar (Pertemuan Sungai Progo dan Bedog) di Mangir, Situs Sendang Ngembel, *Outbond*, Lokasi Mancing di Sungai Progo, Jalur Motorcross, dan Wisata Buah Durian.

Aspek utama yang diperoleh dalam hal ini adalah pemetaan lingkungan di Desa Sendangsari untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata melihat pada 2 aspek lingkungan yakni kondisi alam dan sosial. Kondisi alam menempatkan karakteristik wilayah,

topografi dan lahan sebagai sumber untuk dapat dikelola sebagai daerah tujuan wisata. Selanjutnya terdapat aspek sosial yang mana hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang mengelola potensi alam untuk kelangsungan hidup justru menjadi sebuah strategi dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata. Maka sinergitas inilah yang menarik dalam hasil kajian yang ditemukan.

1. Pemberdayaan Sosial sebagai Optimalisasi Potensi Pariwisata

Membahas temuan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat sinergitas antara faktor alam dan faktor sosial dalam strategi pengelolaan lingkungan sebagai kawasan pariwisata di Desa Sendangsari maka hal ini berdampak pada aspek lain terkait pembangunan. Kunci pembangunan suatu kawasan perdesaan adalah pemberdayaan. Ketika melihat adanya sinergitas antara kondisi alam dan sosial di Desa Sendangsari, maka keberadaan masyarakat yang turut mengoptimalkan potensi lahan sebagai bagian dari cara memenuhi kebutuhan hidup dan mengelola lingkungan untuk pengembangan pariwisata, terdapat bentuk pemberdayaan sosial yang terdapat di Desa Sendangsari. Hal inilah yang sejalan dengan UU Desa yang mana adanya prinsip otonomi desa untuk dapat memberdayakan masyarakat sehingga berperan aktif dalam pembangunan desa. Bentuk pemberdayaan sosial dilaksanakan dalam proses pengembangan potensi wisata di Desa Wisata Sendangsari dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Potensi masyarakat diberdayakan untuk dapat dikelola semaksimal mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan masyarakat khususnya pengembangan potensi wisata.

Adanya berbagai potensi wisata dan daerah tujuan wisata terdapat di Desa Sendangsari yang berasal dari kekayaan dan kondisi alam di Sendangsari yang dikelola oleh masyarakat menjadi aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan. Hal ini sangat berkaitan dengan UU Desa yang menempatkan kemandirian desa dalam pengelolaan desa. Melalui analisis potensi yang dilakukan oleh desa, maka berbagai kebijakan terkait pengelolaan anggaran juga mengalokasikan untuk kepentingan pengembangan potensi wisata. Selain itu kebijakan pembangunan kebudayaan melalui pariwisata yang terdapat dalam UU Keistimewaan juga semakin selaras dengan apa yang dilakukan di Desa Sendangsari. Aspek budaya dikembangkan melalui pengelolaan potensi lingkungan sebagai kawasan wisata. Sehingga mewujudkan

pemberdayaan sosial yang mengoptimalkan potensi wisata.

Prinsip hubungan implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan terkait pembangunan kawasan wisata adalah menitikberatkan pada kemampuan desa untuk dapat mendayagunakan potensi desa dengan pemberdayaan sosial melalui lembaga desa. Sehingga 3 hal tersebut yang kemudian dipetakan pada kondisi masyarakat desa untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Proses inilah yang juga dilakukan di Desa Sendangsari. Pemberdayaan sosial dilakukan sebagai upaya pengelolaan lingkungan untuk pengembangan kawasan wisata melalui lembaga desa. Hal-hal yang dilakukan¹¹ adalah

- a. Melaksanakan perencanaan pembangunan yang mendukung program wisata. Hal ini dilaksanakan oleh Pokgiat LPMD selaku lembaga pembangunan di level dusun. Kegiatan Pokgiat LPMD disesuaikan dengan orientasi pembangunan desa wisata. Seperti yang terjadi di Desa Wisata Mangir terdapat alokasi anggaran untuk pembuatan pintu gerbang selamat datang di kawasan Mangir, selanjutnya seperti penyediaan sarana lampu penerangan, penyewaan tenda dan kursi¹².
- b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung program wisata. Berbagai kegiatan yang mendukung program pariwisata dilakukan oleh segenap unsur lembaga desa. Karang taruna memiliki program untuk inovasi produk kerajinan, PKK mendukung dalam sektor pengelolaan makanan, LPMD pada pembangunan infrastruktur dan aktivitas ritual seperti merti dusun. Kegiatan ini mendukung program wisata yang ada di masing-masing Desa Wisata. Selain itu di Desa Wisata Krebet terdapat koperasi sebagai unit simpan pinjam kelompok pengrajin. Hal ini sangat mendukung program wisata yakni pengelolaan kelompok pengrajin¹³.
- c. Pemberdayaan kelompok-kelompok usaha yang mendukung program wisata. Dalam hal ini terkait dengan peran lembaga dalam mengelola potensi yang ada baik SDM maupun SDA. Seperti dicontohkan di Desa Wisata Mangir, PKK membentuk Kelompok Wanita Tani sebagai salah satu kelompok yang memiliki aktivitas di bidang seni pertanian. Kegiatan ini sangat mendukung aktivitas wisata melalui kegiatan *gejog lesung* dan pengelolaan hasil pertanian menjadi makanan lokal.

11 V. Indah Sri Pinasti. *op.cit.* hlm.39-41

12 Wawancara pada salah satu ketua LPMD, 2 September 2015

13 Wawancara pada salah satu Ketua Pokdarwis, 19 Agustus 2015

- d. Mengakomodir kebutuhan pembangunan dan mengkomunikasikan di tingkat desa. Lembaga di wilayah desa wisata juga memiliki peran dalam mengakomodir kebutuhan pembangunan melalui musrembangdus (musyawarah *rembug* pembangunan di tingkat dusun) yang kemudian dikomunikasikan di tingkat desa. Oleh sebab itu segala perencanaan pembangunan diakomodir di setiap wilayah.
- e. Menyiapkan SDM yang berkualitas melalui program pelatihan yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Hal ini berkaitan dengan fungsi pendidikan dari masing-masing lembaga. Melalui program pendidikan di Karang Taruna atau PKK masyarakat dapat turut dalam proses peningkatan SDM. Seperti yang dilaksanakan di Mangir, melalui Sekolah Pemuda Mangir yang melibatkan unsur pemuda sengaja dilaksanakan agar kapasitas SDM pemuda meningkat khususnya dalam pengelolaan wisata. Untuk PKK mendukung dalam proses penyiapan anak-anak yang berkualitas dan lansia yang terjamin¹⁴.
- f. Sosialisasi potensi wisata. Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam hal ini Karang taruna. Kegiatan sosialisasi wisata dilakukan oleh karang taruna sebagai bagian dari program kerja. Karang taruna menjadi motor dalam kegiatan sosialisasi potensi wisata karena pemuda sangat erat dengan aktivitas media.
- g. Kerjasama dengan lembaga lain yang mendukung pengembangan potensi wisata. Lembaga juga berperan dalam proses kerjasama dengan lembaga lain di luar Desa Wisata yang berfungsi untuk mendukung pengembangan potensi wisata. Kerjasama antar lembaga dilakukan di Desa Wisata Mangir melalui lembaga pendidikan, LSM, lembaga sosial lainnya.

2. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Kawasan Desa Wisata

Pemanfaatan lingkungan dalam pengembangan pariwisata di Desa Sendangsari dilakukan dengan memperhatikan potensi Desa Wisata¹⁵. Desa wisata merupakan suatu kawasan perdesaan yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian dan memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai

14 Wawancara pada pengurus PKK, 9 September 2015

15 V. Indah Sri Pinasti. *op.cit.*

komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan dan minuman serta kebutuhan wisata lainnya¹⁶. Hal ini yang selanjutnya ditindaklanjuti di Desa Sendangsari. Pada proses penggalian potensi wisata melibatkan masyarakat karena dari masyarakat yang secara mandiri membuka peluang wisata maka desa mendukung dalam proses pengelolaannya. Salah satunya misalnya dengan bentuk pengelolaan wisata oleh Kelompok Sadar Wisata di setiap kawasan Desa Wisata. Desa wisata tersebut terbentuk atas inisiatif warga atau dengan dorongan pemerintah desa. Seperti disebutkan di awal bahwa misalnya saat ini ada 2 kawasan Desa Wisata yang sangat menonjol yakni Desa Wisata Krebet dan Desa Wisata Mangir. Kemunculan desa wisata ini berasal dari kesadaran masyarakat atas potensi alam dan sosial yang ada di wilayahnya. Pemerintah desa dalam hal ini juga terlibat pada proses pembentukan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis). Dicontohkan di Desa Wisata Krebet bahwa inisiatif warga untuk mengelola potensi kayu menjadi batik kayu di kawasan tersebut membuat Desa Wisata Krebet banyak diminati oleh wisatawan.

Proses pembangunan kawasan wisata Krebet merupakan upaya untuk membangun potensi setiap kawasan pun dilakukan. Hal tersebut dikarenakan di Desa Sendangsari memiliki banyak potensi wisata. Hal ini menjadi menarik karena ada usaha yang saling bersinergi antara pemerintah Desa, masyarakat dan kelompok sosial di masyarakat. Salah satu potensi wisata yang menarik perhatian berbagai wisatawan baik domestik maupun asing adalah Desa Wisata Krebet dan Desa Wisata Mangir. Keberadaan industri batik kayu yang selanjutnya dikonsepsi sebagai wisata edukatif dan rekreatif menarik minat berbagai kelompok masyarakat, pelajar dan wisatawan untuk tinggal di daerah Krebet kemudian belajar mengenai batik dan kesenian tradisional. Selain itu panorama alam perdesaan dengan situs sejarah Mangir menjadi daya tarik di Mangir. Akhirnya hal tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai salah satu potensi wisata di Desa Sendangsari. Latar belakang masyarakat Desa Sendangsari yang masih bersifat tradisional dan masih mempertahankan adat istiadat dengan berbagai keseniannya membuat potensi seni di desa ini masih terus dilestarikan. Akulturasi budaya modern dan tradisional menjadi hal yang inovatif ketika di desa ini kemudian dikreasikan dalam berbagai jenis kesenian seperti campursari, gamelan kontemporer, musik perkusi, dan jathilan.

16 Suryo Sakti Hadiwijoyo.*op.cit.*

3. Daya Dukung Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata

Dari hasil penelitian dijelaskan lebih lanjut tentang kebijakan pembangunan desa wisata di Kabupaten Bantul didasarkan pada strategi pengembangan pariwisata Bantul. Adanya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah dengan meningkatkan peran budaya sebagai basis kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan didukung oleh inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergitas antar pelaku wisata. Implementasi strategi pembangunan kebijakan tersebut terlaksana dalam beberapa program:

- a. Program pendampingan desa wisata yang dibiayai dengan dana APBD I
- b. Membentuk Forum Komunikasi Pokdarwis dan Desa Wisata se Bantul
- c. Memberikan fasilitasi kemitraan dengan dinas/instansi terkait baik di lingkup pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, maupun asosiasi pariwisata.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan jaminan terhadap arah pengembangan desa wisata di Kabupaten Bantul yang sinergi terhadap strategi pembangunan desa wisata di setiap desa. Sesuai dengan strategi pengembangan desa wisata memang diarahkan pada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Pengelolaan desa wisata menggunakan prinsip keterlibatan masyarakat untuk dapat:

- a. Menjadi pelaku kegiatan kepariwisataan
- b. Menjadi pemilik langsung / tak langsung
- c. Kepemilikan atas tanah dan tidak dialihkan
- d. Prinsip kemitraan adalah untuk pemberdayaan masyarakat
- e. Kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat
- f. Pelestarian budaya, tradisi dan lingkungan (memperkuat organisasi sosial masyarakat)

Berdasarkan program kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat maka hal ini sejalan dengan prinsip implementasi UU Desa yang memberikan peluang bagi desa

untuk mengembangkan potensi. Poin penting dalam pelaksanaan UU Desa adalah pengakuan status desa, melestarikan budaya, mendorong pemberdayaan, keterbukaan, meningkatkan pelayanan, ketahanan sosial budaya. Melalui pengembangan sektor pariwisata dan budaya pengakuan status desa sebagai wilayah yang dapat melestarikan budaya, mendorong pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan ketahanan sosial budaya. Beberapa proses implementasi kebijakan UU Desa dan UU Keistimewaan dalam rangka pengembangan desa wisata di Kabupaten Bantul muncul dalam proses

- a. Sinergitas antara Desa Budaya dengan Desa Wisata. Hal ini dimaksudkan beberapa desa budaya dapat diupayakan menjadi desa wisata sehingga budaya setempat dapat dikemas dalam bentuk paket wisata dan “dijual” kepada wisatawan sehingga dapat menambah ekonomi dan akhirnya mampu mensejahterakan rakyat. Hal tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan, penyelenggaraan event, *family trip*, pameran, dan misi budaya.
- b. Pendampingan berupa monitoring apakah di desa tersebut sudah membuat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan apakah sudah memasukkan sektor budaya & pariwisata dalam program kerja maupun anggaran desa tersebut. Ini merupakan langkah lebih lanjut dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Prinsipnya pengelolaan desa wisata dan desa budaya di masing-masing kawasan diserahkan kepada desa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih kepada sosialisasi dan pengarahan program yang dirancang oleh desa untuk pengembangan desa wisata.
- c. Pendamping Kebudayaan. Fungsinya sebagai pendamping bagi kelompok-kelompok pengembang potensi pariwisata dan kebudayaan di desa dapat berkonsultasi mengenai proses pengelolaan potensi pariwisata di desa. Salah satu contoh yang dilaksanakan oleh Pendamping Kebudayaan di Desa Wisata Mangir. Melalui pendamping kebudayaan, kegiatan pengembangan kelompok budaya dan pariwisata diperhatikan dengan maksimal. Pendamping kebudayaan di Desa Wisata Mangir berhubungan secara langsung dengan masyarakat di setiap kegiatan pengembangan potensi budaya dan pariwisata.
- d. Mendorong secara aktif kepada masing-masing Desa Wisata untuk dapat mengembangkan potensi wisata dengan

melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui hal tersebut maka pengelolaan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh desa. Tentunya melibatkan lembaga desa dan unsur masyarakat desa yang lain. Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan desa wisata yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Terdapat hubungan sinergis yang diciptakan dari unsur swasta, pemerintah dan masyarakat yakni 1) pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, 2) swasta sebagai pengembang investor, 3) masyarakat sebagai subjek pengembang.

Penutup

Lingkungan sebagai pusat aktivitas masyarakat di perdesaan menjadi ruang gerak yang mempengaruhi kehidupan manusia di dalamnya. Keberlangsungan hidup masyarakat perdesaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Keberadaan UU Desa dan UU Keistimewaan memberi ruang gerak bagi masyarakat desa untuk dapat mengembangkan potensi desa. Adanya jaminan terkait pengelolaan lingkungan dan kemandirian desa memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap arah dan pembangunan desa. Begitu pula di Desa Sendangsari. Kondisi lingkungan yang memiliki 2 aspek penting secara fisik dan sosial mempengaruhi berbagai aktivitas manusia di dalamnya. Maka, terbentuknya desa wisata sebagai dampak dari kondisi lingkungan yang cukup potensial sangat dekat dengan logika pemberdayaan. Pemberdayaan hadir sebagai aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk dapat mengelola potensi lingkungan. Pengelolaan dilakukan dalam wujud pengembangan pariwisata melalui Desa Wisata. Desa wisata dikelola dengan berbagai upaya dan strategi yakni pemetaan lingkungan berupa potensi desa, pemberdayaan sosial untuk optimalisasi potensi wisata, dan daya dukung pemerintah.

Daftar Bacaan

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Iwan, Nugroho. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Januarti, Nur Endah. 2013. *Thesis: Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Sumberdaya Lokal*. Yogyakarta: UGM.
- Marimin. 2013. *Isu-isu Krusial di dalam Pengelolaan Desa Wisata sebagai Alternatif Berwirausaha*. www.stpsahidsolo.ac.id. Internet: diakses pada 3 Maret 2015.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Pinasti, V. Indah. 2015. *Laporan Penelitian: Pembangunan Desa Wisata sebagai Implementasi Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keistimewaan DIY (Studi Di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY)*. Yogyakarta: UNY.
- Pitana, I Gde dan Putu Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sujito, Ari. 2014. *Transformasi Desa: Apa yang bisa Dimanfaatkan dari UU Desa?*. Materi Diskusi Implementasi UU Desa Karang Taruna DIY. Yogyakarta.

Sumber Lain

- Dinas Kebudayaan DIY. tt. Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.
- Nn, Kata Kunci: Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa, Tersedia pada: <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada: 27 Februari 2015.
- Pemerintah Desa Sendangsari. 2012. *Profil Desa Sendangsari*. Yogyakarta.